



Fungsi Sosialisasi, Rekrutmen, Dan Komunikasi Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Efektif

The Function Of Socialization, Recruitment, And Political Communication In Realizing Effective Political Participation

**Olivia Rizka Vinanda¹, Cindy Atari², M. Andri Pratama³
Muhammad Bagus Arya⁴, Natasya Diva Azahra⁵, Rizki Apriansyah⁶**

Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: cindyatari53@gmail.com¹, pratamaaaa.1435@gmail.com², muhammadbagusarya00@gmail.com³

Natasyadivaazahra1234@gmail.com⁴, apririzki993@gmail.com⁵

Article Info

Article history :

Received : 22-05-2025

Revised : 24-05-2025

Accepted : 26-05-2025

Pulished : 28-05-2025

Abstract

Political participation is an important indicator in the sustainability of democracy. The success of a political system is largely determined by the effectiveness in carrying out the functions of socialization, recruitment, and political communication. This article aims to analyze how these three functions play a role in increasing political participation in society effectively. The method used in this paper is a literature study with a descriptive-qualitative approach. The results of the study show that political socialization forms political awareness of citizens, political recruitment ensures leadership regeneration, and political communication becomes a means of interaction between the elite and the people. The three interact with each other in creating quality and sustainable political participation.

Keywords: *Political socialization, Political recruitment, Political communication*

Abstrak

Partisipasi politik merupakan indikator penting dalam keberlangsungan demokrasi. Keberhasilan sistem politik sangat ditentukan oleh efektivitas dalam menjalankan fungsi sosialisasi, rekrutmen, dan komunikasi politik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketiga fungsi tersebut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara efektif. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sosialisasi politik membentuk kesadaran politik warga, rekrutmen politik menjamin regenerasi kepemimpinan, dan komunikasi politik menjadi sarana interaksi antara elite dan rakyat. Ketiganya saling berinteraksi dalam menciptakan partisipasi politik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Sosialisasi politik, Rekrutmen politik, Komunikasi politik*

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan elemen fundamental dalam kehidupan demokrasi (Affan, 2020). Tanpa keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, maka sistem demokrasi akan kehilangan legitimasi dan esensinya. Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kegiatan organisasi politik, hingga menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi atau media sosial. Namun, tingkat partisipasi politik yang tinggi tidak otomatis mencerminkan kualitas demokrasi jika tidak didukung oleh pemahaman politik yang baik, keterlibatan yang sadar, dan sistem yang inklusif (Haryanto, A., (2021).



Dalam konteks inilah pentingnya peran fungsi-fungsi sistem politik, khususnya sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Ketiga fungsi ini membentuk fondasi utama dalam mengembangkan kesadaran politik masyarakat, membuka akses terhadap kekuasaan, dan menjaga hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Ketiganya bukan hanya alat teknis, tetapi juga instrumen normatif untuk memperkuat budaya demokrasi dan menciptakan warga negara yang partisipatif dan kritis (Gaynell & Bakry., 2023).

Sosialisasi politik berperan dalam membentuk dan mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan informasi politik kepada individu. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif, masyarakat akan sulit memahami peran mereka dalam sistem politik, hak-hak yang mereka miliki, serta bagaimana cara menyuarakan aspirasi secara legal dan konstruktif. Proses ini umumnya dimulai sejak usia dini dan berlangsung sepanjang hayat melalui berbagai agen seperti keluarga, sekolah, media, dan lingkungan sosial (Wibowo, A., 2020).

Sementara itu, rekrutmen politik adalah proses penting dalam menjaring dan menyeleksi individu-individu yang akan memegang jabatan dalam sistem politik (Ma'arif, A., 2022). Dalam sistem demokrasi, rekrutmen harus terbuka, adil, dan berdasarkan kompetensi, bukan karena afiliasi pribadi atau kekuatan ekonomi. Rekrutmen politik yang sehat memastikan terjadinya regenerasi kepemimpinan, keterwakilan kelompok masyarakat yang beragam, serta menciptakan kompetisi politik yang sehat dan demokratis (Putra, R. A., 2023).

Adapun komunikasi politik menjadi jembatan utama antara elite politik dan masyarakat. Fungsi ini memungkinkan pertukaran informasi, pembentukan opini publik, serta akuntabilitas kekuasaan. Komunikasi politik yang efektif menjamin bahwa rakyat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang dapat memberikan masukan, kritik, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Rosidi, R., 2023).

Namun, dalam praktiknya, ketiga fungsi tersebut seringkali belum dijalankan secara maksimal di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Rendahnya tingkat literasi politik, minimnya pendidikan politik formal, eksklusivitas dalam rekrutmen partai, serta maraknya disinformasi di media sosial menjadi tantangan serius yang menghambat partisipasi politik yang sehat dan efektif (Juanda, O., 2022). Oleh karena itu, analisis terhadap peran strategis fungsi sosialisasi, rekrutmen, dan komunikasi politik menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana membangun partisipasi politik yang tidak hanya aktif tetapi juga berkualitas.

Melalui tulisan ini, penulis mencoba menjelaskan bagaimana ketiga fungsi tersebut berkontribusi dalam membentuk partisipasi politik yang efektif, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Harapannya, tulisan ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, maupun pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan partisipasi politik masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik berkontribusi terhadap pembentukan partisipasi politik yang efektif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena politik secara



kontekstual dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang melatarbelakanginya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Ketiga Fungsi Politik terhadap Partisipasi Politik yang Efektif

Fungsi sosialisasi, rekrutmen, dan komunikasi politik memiliki peran saling melengkapi dalam membentuk partisipasi politik yang efektif. Ketiganya membentuk sebuah siklus yang jika berjalan secara seimbang akan menghasilkan warga negara yang sadar, aktif, kritis, dan terlibat dalam kehidupan politik.

1. Sosialisasi Politik sebagai Landasan Awal

Sosialisasi politik menjadi tahap awal dalam membangun partisipasi yang efektif. Individu yang tidak disosialisasikan secara baik mengenai hak dan tanggung jawab politiknya, kemungkinan besar akan menjadi apatis atau bahkan bersikap negatif terhadap politik. Melalui sosialisasi, masyarakat diperkenalkan pada nilai-nilai demokrasi, pentingnya pemilu, fungsi lembaga negara, hingga cara-cara menyampaikan aspirasi secara legal (Arbi, Z., 2022).

Sebagai contoh, program pendidikan politik bagi pemilih pemula dapat membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab politik sejak dini. Lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan penting dalam menyebarluaskan informasi ini secara masif dan netral. Tanpa sosialisasi yang memadai, warga negara akan berada dalam ruang hampa politik (Jumadi & Silviani, 2020).

2. Rekrutmen Politik sebagai Jalur Keterlibatan Langsung

Setelah memahami sistem politik melalui sosialisasi, warga negara membutuhkan ruang untuk berkontribusi secara langsung. Di sinilah fungsi rekrutmen politik mengambil peran. Proses ini membuka kesempatan bagi individu untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi pengambil keputusan.

Rekrutmen yang adil, transparan, dan inklusif mendorong munculnya pemimpin yang mewakili beragam lapisan masyarakat. Rekrutmen yang eksklusif dan penuh kepentingan justru akan menghambat aspirasi rakyat, membuat politik hanya milik segelintir elite, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.

3. Komunikasi Politik sebagai Penghubung Dinamis

Komunikasi politik berperan dalam menjaga keterhubungan antara rakyat dan pemimpin. Dalam sistem demokrasi, komunikasi yang sehat menciptakan arus dua arah di mana pemerintah tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengar dan merespons. Komunikasi inilah yang memungkinkan rakyat untuk mengetahui kebijakan, mengkritisi program, dan mempengaruhi arah kebijakan publik.

Partisipasi politik menjadi efektif bila komunikasi politik dilakukan secara jujur, terbuka, dan berorientasi pada pendidikan publik. Sebaliknya, komunikasi yang manipulatif atau didominasi oleh propaganda bisa menyesatkan publik dan merusak partisipasi politik (Prasetyo & Adnan., 2019).



Tantangan dalam Implementasi Ketiga Fungsi Politik

Walaupun secara ideal ketiga fungsi ini saling menopang, dalam kenyataannya masih banyak hambatan yang membuat partisipasi politik belum berjalan secara efektif. Tantangan-tantangan itu meliputi:

1. Kesenjangan Pendidikan Politik

Banyak warga belum mendapatkan akses terhadap pendidikan politik yang memadai. Di daerah terpencil, program sosialisasi politik sering tidak menjangkau masyarakat. Akibatnya, informasi politik hanya diterima dari sumber-sumber yang tidak kredibel, seperti hoaks media sosial.

2. Rekrutmen yang Tidak Transparan

Proses pencalonan dalam partai politik sering kali masih bersifat eksklusif. Uang dan popularitas kerap menjadi syarat utama ketimbang integritas dan kapasitas. Ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan membuat masyarakat enggan terlibat dalam partai.

3. Polarisasi dan Disinformasi dalam Komunikasi Politik

Maraknya penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan kampanye hitam telah merusak kualitas diskusi publik. Komunikasi politik menjadi ajang perpecahan alih-alih jembatan penghubung antarwarga negara.

4. Budaya Apatitis dan Takut Berpolitik

Sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, masih menganggap politik sebagai sesuatu yang jauh, rumit, dan penuh konflik. Trauma terhadap praktik politik masa lalu yang koruptif juga menyebabkan sebagian masyarakat enggan untuk berpartisipasi secara aktif.

KESIMPULAN

Dari ketiga fungsi tersebut (sosialisasi, rekrutmen, dan komunikasi) terlihat bahwa partisipasi politik yang efektif hanya bisa terwujud jika fungsi-fungsi ini berjalan secara sinergis dan berkeadilan. Masyarakat harus diberikan akses, kesempatan, dan pengetahuan yang cukup untuk terlibat secara aktif dalam politik. Keberhasilan partisipasi politik yang efektif sangat ditentukan oleh sinergi antara fungsi sosialisasi, rekrutmen, dan komunikasi politik. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara bersamaan dan berkelanjutan oleh berbagai aktor: negara, partai politik, media, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil.

Di sisi lain, tantangan yang menghambat efektivitas fungsi-fungsi ini perlu dijawab dengan reformasi sistem, penguatan literasi politik, dan pembangunan budaya politik yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, M. (2020). Partisipasi politik di Indonesia: Teori dan realitas. Yogyakarta: Deepublish.
- Arbi, Z. (2022). Sosialisasi politik dan pembentukan kesadaran demokrasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gaynell & Bakry. (2023). Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Pulau Jawa Menjelang Pemilu 2024. *Jurnal Perspektif*, 8(1), 43–56.
- <https://doi.org/10.24853/pk.8.1.43-56>



- Haryanto, A. (2021). Komunikasi politik: Teori dan praktik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juanda, O. (2022). Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas dan Bermartabat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 1–10.
<https://greenpub.org/JIM/article/download/249/219>
- Jumadi & Silviani (2020). Peranan Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Mempertahankan Kepercayaan Publik di Daerah Pilihan III Kota Medan. *Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 5(1), 44–61.
<https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/socialopinion/article/download/580/925/>
- Ma'arif, A. (2022). Pendidikan politik untuk demokrasi substansial. Yogyakarta: LKiS.
- Prasetyo & Adnan (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 2(3), 157–163. <http://dx.doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.83>
- Putra, R. A. (2023). Implementasi Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 76–85.
<https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/7762>
- Rosidi, R. (2023). Komunikasi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Milenial. *Neo Respublica*, 1(1), 165–172.
<https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/235>
- Wibowo, A. (2020). Partisipasi politik di era digital: Peran media sosial dalam demokrasi Indonesia. Bandung: Refika Aditama.